



PEMILU MENDEKAT, ASN MAKIN NEKAT

Zona Paling Tak Netral: 4 Provinsi di Sulawesi dan Jawa Tengah

Sepekan jelang hari pencoblosan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai makin nekat. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menangani sejumlah laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Hasilnya, ada 5 provinsi dengan jumlah pelanggaran terbanyak. Sebanyak 4 wilayah di Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Satu lagi di Jawa Tengah (Jateng). Kejutan karena dua orang yang bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) berasal dari provinsi yang ada di tengah-tengah Pulau Jawa itu. Ganjar Pranowo, calon presiden (capres) nomor urut 03, merupakan mantan Gubernur Jateng dan Gibran Raka Buming Raka adakawah Wali Kota Solo yang kini ikut kontestasi sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02. Memprihatinkannya, modus-modus pelanggaran yang ditemukan adalah mengarahkan untuk memilih calon tertentu, hingga mengarahkan pembangunan fisik daerah yang tidak berdasarkan prioritas melainkan kepentingan elektoral. Nakal.

Baca di hal 11....

10 PROVINSI PALING RAWAN PELANGGARAN ASN

Sulawesi Selatan	45 Pelanggaran
Sulawesi Tenggara	29
Jawa Tengah	22
Sulawesi Barat	20
Sulawesi Tengah	8
Provinsi Riau	7
Provinsi Banten	6
Nusa Tenggara Barat	5
Nusa Tenggara Timur	4
Sulawesi Utara	3

**Government (Hal.2)
Konsumsi Anjlok,
Rakyat Menengah
'Makan Tabungan'**

Diberitahukan kepada pembaca setia,
Kamis (8/2/2024) Koran Lentera Today
tidak terbit. Terbit kembali pada Senin
(12/2/2024). Update berita bisa terus
dinikmati melalui www.lenteratoday.com.

SANKSI PELANGGARAN NETRALITAS

1 PELANGGARAN DISIPLIN

a. Hukuman Disiplin Sedang
Pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25%
selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan

b. Hukuman Disiplin Berat

- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS

- Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021

2 PELANGGARAN KODE ETIK

1.Sanksi moral pernyataan secara terbuka
2.Sanksi moral pernyataan secara tertutup
sesuai Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Konsumsi Anjlok, Rakyat Menengah 'Makan Tabungannya'

JAKARTA - Konsumsi masyarakat sepanjang tahun 2023 lesu darah. Berbagai faktor musiman seperti Natal dan Tahun Baru dan Pemilu tidak berhasil mengerek laju belanja dan menggerakkan perekonomian.

Bahkan, Sepanjang 2023, masyarakat kelas menengah mesti menguras tabungannya demi memenuhi berbagai kebutuhan hidup, di tengah pendapatan yang stagnan dan biaya hidup yang meningkat. Fenomena ini sampai memunculkan istilah beken 'makan tabungan' atau 'mantab', yang juga diakui oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada saat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,05% pada 2023, dari 2022 tumbuh 5,31%, konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 4,82%, dari sebelumnya 4,94%.

Porsi konsumsi rumah tangga dalam struktur keseluruhan ekonomi atau produk domestik bruto merupakan yang terbesar, yakni 53,18%. Diikuti investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 29,33%, dan ekspor 21,75%.

Ekonom senior yang juga merupakan Co-founder Creco Research Raden Pardede mengatakan, melambatnya konsumsi rumah tangga itu disebabkan oleh kecenderungan perlambatan belanja dari kelas menengah.

"Memang kelas bawah masih cukup baik, demikian juga kelas atas, tapi kelas menengah ini sedikit melambat, kelas ini yang paling kritis selalu," kata Raden dikutip CNBC Indonesia, Selasa (6/2/2024).

Melambatnya belanja kelas menengah ini menurut Raden karena terpengaruh oleh perubahan harga, khususnya harga-harga di sektor transportasi dan akomodasi. Pertumbuhan kedua sektor ini pun juga anjlok pada 2023 meski masih tumbuh tinggi.

Pada 2023, berdasarkan catatan BPS, pertumbuhan sektor transportasi dan perdagangan hanya tumbuh 13,96%, dan akomodasi serta makan minum tumbuh 10,01%. Padahal, pada 2022 pertumbuhan sektor transportasi dan perdagangan mencapai 19,87% dan akomodasi serta makan minum 11,97%.

"Jadi kelas menengah itu adalah kelas yang sebetulnya memang sensitif, sensitif terhadap kenaikan harga, harga akomodasi dan transportasi, dan juga sensitif terhadap suku bunga," tutur Raden.

"Karena kelas menengah ini lah yang mungkin masih banyak cicil KPR nya, jadi mereka ini kelompok yang paling sensitif," tega mantan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Dari proporsinya dalam struktur



(Ilustrasi) Faktor musiman yaitu Natal dan Tahun Baru serta Pemilu 2024 tidak berhasil mengerek laju belanja masyarakat. (dok)

ekonomi Indonesia, kelas menengah memang mendominasi. Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk Aspiring Indonesia - Expanding the Middle Class pada 2022 lalu, porsinya hampir setengah dari total penduduk Indonesia.

Bank Dunia atau World Bank dalam laporannya itu menggunakan data penduduk Indonesia pada 2016 yang sebanyak 261 juta jiwa. Kelas atas jumlahnya hanya 3,1 juta, sedangkan kelas menengah 53,6 juta, kelas rentan 114,7 juta, kelas rentan 61,6 juta, dan kelas bawah atau miskin 28 juta.

Raden berujar, kelas menengah juga masih rentan karena tidak mendapatkan stimulus ekonomi langsung dari pemerintah. Untuk kelas bawah, kehidupan sehari-harinya masih dibantu dengan bansos. Akibatnya, ketika ada perubahan harga, konsumsi kelas menengah harus ditutup dengan tabungannya.

"Kelas menengah tadi yang biasanya tidak dapat bantuan pemerintah harapan mereka hanya dapat dari kenaikan gaji, dari pendapatan tetap, fix income mereka. Mereka dapat pendapatan dari gaji atau pendapatan lain, berbeda dengan kelas bawah tadi," tutur Raden.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menegaskan melemahnya konsumsi rumah tangga bukan disebabkan oleh kelas menengah yang memilih berinvestasi. Sebab, jika menilik data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah tabungan kelas menengah justru berkurang. Itu menunjukkan kalau mereka tetap berbelanja.

Data LPS menunjukkan, setidaknya sampai September 2023 tabungan kelas menengah dan menengah-atas menurun. Kelompok pemilik tabungan dengan nilai Rp 100 juta-200 juta (menengah-atas) menurun 0,42 persen, sementara pemilik tabungan di bawah Rp 100 juta (menengah)

menurun 1,43 persen. Keduanya merupakan kelompok masyarakat terbesar di Indonesia. Menurunnya tingkat tabungan di masyarakat dan pola konsumsi yang hanya untuk bertahan hidup itu merupakan pertanda kondisi ekonomi negara yang sedang tidak baik-baik saja.

BPS Sebut untuk Investasi

Menurut Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (5/2/2024), 'anomali' konsumsi rumah tangga yang melambat itu utamanya berasal dari melambatnya pengeluaran kelompok menengah atas. Kelas menengah memilih untuk menabung dan berinvestasi ketimbang berbelanja.

Fenomena kelas menengah yang menahan belanja bukan faktor utama yang membuat konsumsi rumah tangga anjlok.

Hal itu, ujarnya, tecermin dari sejumlah indikator, antara lain pajak pertambahan nilai (PPN) barang mewah yang melambat serta jumlah penumpang angkutan udara dan penjualan mobil yang tidak sebanyak tahun lalu. "Sementara investasi finansial, seperti simpanan berjangka, menguat. Artinya, ada sedikit pergeseran dari spending kepada investasi," ujarnya.

Ia menampik dugaan bahwa daya beli masyarakat terganggu. "Daya beli terlihat masih cukup terjaga. Perlambatan itu utamanya karena pengeluaran kelas menengah yang melambat karena mereka cenderung memilih berinvestasi," ujarnya.

Namun, peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menilai, fenomena kelas menengah yang berhemat dan menahan belanja bukan faktor utama yang membuat konsumsi rumah tangga anjlok sepanjang tahun lalu.

"Semestinya, kalau kelas menengah atau kelompok lainnya

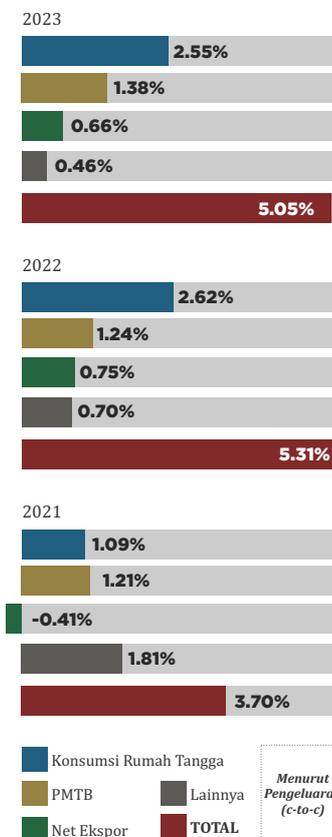
memilih investasi, pendapatan atau produk domestik bruto (PDB) kita tidak menurun karena tetap akan terefleksikan melalui investasi (portofolio) yang meningkat," katanya.

Ia menilai, konsumsi rumah tangga yang melambat itu menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Selama tahun 2023, ekonomi memang melambat karena berbagai faktor, mulai dari tekanan global sampai domestik, seperti fenomena El Nino yang menyebabkan inflasi harga pangan.

"Jadi, faktor utamanya sebenarnya ada problem daya beli yang tergerus karena faktor naiknya inflasi harga bergejolak yang didorong oleh El Nino. Bansos yang diberi di pengujung tahun cukup berpengaruh menjaga daya beli. Artinya, kalau bansos saat itu tidak diberikan, tingkat konsumsi justru bisa tergerus lebih dalam lagi," kata Riefky.

Alokasi pendapatan masyarakat untuk menabung menurun, sementara proporsi pendapatan masyarakat untuk membayar cicilan atau utang meningkat. (wid,rls,ist/dya)

SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (2021-2023)



Mandek 20 Tahun, Pengesahan RUU PPRT di Rapat Paripurna Dinanti



(Ilustrasi) Pekerja Rumah Tangga (PRT) sudah berkali-kali menggelar aksi di gedung DPR, Jakarta untuk menuntut pengesahan RUU PRT yang selama ini mandek di DPR. (dok)

JAKARTA — DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-12 dalam rangka penutupan masa persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa (6/2/2024). Dalam rapat tersebut, Anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah mendorong pimpinan DPR untuk segera memberikan persetujuan pembahasan RUU PPRT sehingga bisa disahkan.

Menurutnya, DPR harus memiliki politik yang berpihak kepada PRT dan masyarakat sipil yang sudah memperjuangkan RUU ini selama hampir 20 tahun. "Jadi mereka (masyarakat, red) tidak akan melihat DPR suka bohong. Padahal memang ada mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan sedemikian rupa. Tapi kalau menunggu 20 tahun ini susah dijelaskan ke masyarakat," ujar Luluk di Gedung DPR, Jakarta.

Diketahui, RUU PPRT diajukan ke DPR RI pada tahun 2004. Selama 19 tahun, rancangan tersebut keluar masuk dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas DPR RI. Selama itu pula para PRT terus menunggu adanya payung hukum yang melindungi mereka dari adanya segala bentuk kekerasan, penyiiksaan, dan perbudakan modern yang terjadi hingga saat ini.

Luluk juga tidak ingin masyarakat mempertanyakan parlemen karena tidak bisa menyelesaikan persoalan masyarakat kecil terkait RUU PPRT ini. Padahal, kata dia, pemerintah juga telah memberikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU PPRT. Namun, pimpinan DPR belum memberikan persetujuan pembahasan sehingga RUU ini belum dibahas kembali dengan pemerintah.

"Keberpihakan kita untuk melindungi seluruh tumpah darah, warga, dan bangsa adalah tugas konstitusional. Saya harapkan

sebelum periode kita berakhir pada Oktober 2024, RUU PPRT setidaknya bisa disahkan," tambahnya.

Namun demikian, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Sidang Paripurna tidak menanggapi pernyataan Anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah tentang nasib RUU PPRT.

Di lain kesempatan, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Angraini mengapresiasi pernyataan yang disampaikan Luluk Nur Hamidah. Ia berpandangan penundaan pengesahan RUU PPRT akan menambah daftar panjang kekerasan yang dialami PRT di berbagai wilayah Indonesia.

Data JALA PRT menyebutkan setidaknya ada 2.637 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) sepanjang 2017-2022. "Apalagi Ketua DPR adalah perempuan pertama kali dan seharusnya meninggalkan warisan kebijakan yang pro perempuan setelah pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," jelas Lita.

Desak Pengesahan RUU PPRT yang "Disandera" Pimpinan DPR, Sejumlah PRT Siap Mogok Makan

Lita juga menyayangkan sikap Ketua DPR Puan Maharani yang tidak merespons pernyataan Luluk. Kendati demikian, ia berharap DPR dapat mengesahkan RUU PPRT sebelum masa tugas mereka berakhir pada Oktober 2024. Ia juga menyampaikan PRT dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya akan terus menggelar aksi hingga RUU ini disahkan DPR.

RUU PPRT telah mengalami sejarah yang panjang. Pemerintah telah mengajukan RUU tersebut ke DPR sejak 2004. RUU itu juga masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2019, tetapi hingga

kini belum pernah dibahas di sidang paripurna DPR. Padahal Presiden Joko Widodo juga telah mendesak agar RUU yang satu ini masuk dalam daftar Prolegnas prioritas DPR 2023.

Tebar Janji Paslon

Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md., berjanji akan memprioritaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT jika menang bersama calon presiden Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Mahfud menyebut saat ini posisi RUU PPRT sudah masuk program legislasi nasional atau prolegnas di DPR. Mahfud menyebut pihaknya bersama masyarakat sipil dan perguruan tinggi akan mendorong pengesahan RUU tersebut agar para pekerja rumah tangga bisa mendapat perlindungan hukum.

"Sekarang tinggal kesepakatan partai-partai. Ingat ini negara demokrasi, kalau pemerintah sudah ajukan lalu DPR-nya tidak melanjutkan, kita tidak bisa memaksakan juga," kata Mahfud Januari lalu.

Oleh karena itu, Mahfud berjanji akan berkomitmen untuk menjadikan pengesahan RUU PPRT sebagai program prioritas jika dirinya menang di Pilpres 2024. Mahfud berharap DPR segera mengesahkannya. "Mudah-mudahan segera ditanggapi oleh DPR. Tapi kalau ini misalnya pada periode ini ditanggapi juga, nanti pemerintahan yang akan datang insya Allah ini akan masuk prioritas utama pada periode pertama," ucap Menkopolkum itu.

Hal senada diungkapkan Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan. Dia berjanji menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). "Saya ingin garis bawahi beberapa. Pertama prinsipnya dan RUU ini harus diproses dan dituntaskan dan ada perlindungan di pembantu rumah tangga Indonesia. Tuntaskan," kata Anies.

Anies mengingatkan jangan lagi menggunakan istilah asisten rumah tangga melainkan pekerja rumah tangga. Kemudian, prinsip yang harus dipegang terhadap pekerja rumah tangga adalah perlindungan dan keadilan. Lebih lanjut, Anies mengatakan cawapresnya Muhaimin Iskandar alias Gus Imin handal dalam bidang ini. Pasalnya, Imin merupakan mantan Menteri Ketenagakerjaan yang pernah menghentikan pengiriman PRT ke negara bermasalah. "Jadi, Gus Imin juga ada rekam jejak di perlindungan PRT," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Di samping itu, selain fokus menuntaskan RUU PRT, Anies mengatakan ada beberapa prinsip

yang harus dipenuhi dalam menangani masalah PRT. Pertama, memastikan penghidupan yang layak. Kedua jam kerja yang manusiawi. Ketiga, perlindungan sosial dan kesehatan bagi PRT.

"Ini yang harus kita lakukan dan tidak kalah penting ada pencegahan atas eksploitasi pekerja di bawah umur. Umur minimal harus diterapkan, sehingga mereka terlindungi," ungkap Anies.

Kemudian, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan kepada PRT. Lalu, pemerintah disebut harus menyediakan balai-balai pelatihan untuk PRT. "Sehingga, para pekerja rumah tangga itu punya keterampilan yang membuat mereka bekerja dengan baik dan mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang lebih baik," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (wid,rls,rls/dya)

POKOK PEMBAHASAN RUU PPRT PENGAKUAN PRT

- PENGAKUAN PRT**
 Pengakuan sebagai pekerja yang berhak diperlakukan layak dan terbebas dari diskriminasi.
- PERLINDUNGAN PRT**
 Perlindungan terhadap PRT yang rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi di ranah kerja.
- PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBERI KERJA**
 Menjamin kesetaraan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.
- PEMBATASAN WAKTU DAN KERJA**
 Dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu PRT paruh waktu dan PRT penuh waktu.
- LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
 Pemerintah menyediakan layanan pelatihan PRT untuk meningkatkan keterampilan kerja.
- TERIKAT PERJANJIAN**
 Terikat dengan syarat dan kondisi kerja yang telah ditentukan.

KASUS KEKERASAN TERHADAP PRT

Data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (2017-2022)



DATA KOMNAS PEREMPUAN 2005-2022

2344 KASUS
 PRT yang dilaporkan lembaga layanan mitra Komnas Perempuan

Oktober 2024, PKL di Blitar Wajib Miliki Sertifikat Halal



Suasana Alun-alun Kabupaten Blitar di waktu malam yang dimeriahkan kehadiran pedagang kaki lima (PKL).

BLITAR – Seluruh pedagang makanan dan minuman di Blitar mulai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga Pedagang Kaki Lima (PKL), mulai Oktober 2024 wajib memiliki sertifikat halal.

Kondisi ini langsung direspon Hal ini disampaikan Humas Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Blitar, Jamil Mashudi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 93 Tahun 2021 yang merujuk UU No 33 Tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal. “Pemerintah memang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman, memiliki sertifikat halal,” ujar Jamil, Selasa (6/2/2024).

Lebih lanjut Jamil menjelaskan mengenai tenggang waktu penerapan aturan wajib sertifikat halal yang ditentukan maksimal 17 Oktober 2024 mendatang. “Tujuannya sebagai panduan, agar pelaksanaan program wajib sertifikat halal ini, bisa berjalan

efektif. Sesuai dengan target pemerintah, yang tujuannya baik,” jelasnya.

Esensi dari aturan ini ditegaskan Jamil, bahwa negara hadir memberikan jaminan dan melindungi konsumen atas ketersediaan makanan serta minuman yang halal. “Sebagai negara yang mayoritas muslim, hal ini memberikan perlindungan atas ketersediaan produk halal. Kami dari MUI tentu sangat mendukung aturan ini, tentunya dengan kehati-hatian dan memperhatikan kondisi serta kearifan lokal,” tegasnya.

Karena halal ini berhubungan dengan keyakinan dan agama, jangan sampai halal ini takut aturan tapi bukan karena perintah Allah SWT. “Tapi mulai dari cara menyimpan, mengolah hingga menjualnya juga harus halal agar barokah,” terangnya.

Dalam penerapannya perlu adanya kerjasama dan dukungan semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun ormas keagamaan. Karena menyangkut masyarakat, pelaku usaha mikro sampai pedagang kecil termasuk PKL harus bersertifikat halal. “Dari MUI bersama Kemenag dan perguruan tinggi, sudah melakukan pelatihan kader

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sampai tingkat desa,” ungkap Jamil.

Bahkan beberapa tahun terakhir, MUI bersama pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM. Sudah melakukan sosialisasi, serta fasilitasi agar para pelaku usaha bersertifikat halal. “Perlu diketahui juga, pengurusan sertifikat halal sesuai UU Cipta Kerja untuk usaha mikro dan kecil itu zero cost alias gratis. Sedangkan reguler, usaha menengah dan besar ada biaya resminya. Meskipun persentasenya masih kecil, namun di Kabupaten Blitar sudah banyak yang bersertifikat halal,” pungkasnya.

Sesuai data terakhir dari Kemenag Kabupaten Blitar, sampai awal Januari 2024 ini jumlah pengurusan sertifikat halal sudah mencapai sekitar 6.000 lebih.

Adapun sanksi melanggar aturan wajib sertifikat halal, yang mulai diterapkan pada 18 Oktober 2024. Sesuai PP No 39 Tahun 2021 diberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda administratif hingga penarikan barang dagangan dari peredaran. (ais/lut)

PKV Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lewat Penguatan Vokasi

SURABAYA – Pertumbuhan ekonomi yang berbeda di tiap daerah di Jawa Timur secara tidak langsung menimbulkan kesenjangan. Sementara, permasalahan yang menjadi penghambat pertumbuhan tersebut seringkali tidak terselesaikan secara tuntas.

Berangkat dari fakta ini, 14 Perguruan Tinggi Vokasi (PKV) di Jatim menggabungkan diri dalam konsorsium untuk mencoba mencari solusi melalui Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Jawa Timur. Program ini disupervisi oleh Direktorat Kemitraan dan Penyeragaman Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI) Direktorat Jenderal (Dirjen) Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak 2023.

Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Aliridho Barakbah menerangkan, latar belakang program ini adalah banyaknya persoalan di daerah yang tidak selesai. Di sisi lain, upaya penyelesaian dari persoalan tersebut bersifat sektoral.

“Kita sering mencoba menyelesaikan masalah itu sendiri-sendiri.



Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Aliridho Barakbah.

Akhirnya selesai jangka pendek lalu muncul lagi masalah berikutnya karena penyelesaiannya sifatnya sektoral,” kata Ali saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Jawa Timur di Surabaya, Selasa (6/2/2024).

Menurut Ali, permasalahan yang terjadi di setiap daerah perlu penyelesaian dengan melibatkan lintas

sektoral. Sehingga muncul solusi komprehensif.

“Kita mencoba mengembangkan potensi daerah dengan menginventarisir persoalan yang dihadapi daerah,” terang dia. Melalui kegiatan ini, terang Ali, pihaknya mendorong agar terbentuk jejaring untuk mengidentifikasi persoalan secara bersama serta memaksimalkan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Karena setiap daerah punya potensi masing-masing. Bisa jadi masalah serta kendala di tiap daerah belum selesai,” kata Ali.

Ketua Konsorsium PTV Jatim, Amang Sudarsono menjelaskan, program ini bertujuan mengidentifikasi potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, juga menjembatani kebutuhan daerah dengan sumber daya lokal yang terampil berbasis vokasi.

“Ada beberapa masalah yang menjadi tantangan seperti perkembangan ekonomi daerah, perkembangan industri, kualitas pengajaran, kurangnya keterlibatan industri, serta keselarasan potensi daerah serta skill SDM lokal,” kata Amang.

Dia melanjutkan, seringkali lulusan perguruan tinggi vokasi tidak terserap di daerah lantaran tidak adanya kesinambungan antara kebutuhan dengan skill SDM yang tersedia. Sehingga melalui program ini dapat dihasilkan lulusan yang mampu bekerja sesuai kebutuhan di suatu daerah. (lut/dya)

HARGA BERAS

SEMAKIN

MENGGANAS



Harga beras terus naik beberapa hari belakangan ini.

SURABAYA - Harga sejumlah barang pokok penting naik menjelang perayaan Imlek 2024. Salah satunya adalah harga beras khususnya untuk beras premium. Kenaikan harga ini terjadi di beberapa tempat di Jatim.

Kenaikan harga beras seperti yang terjadi di Jember. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Jember Yuliana Harimurti, mengatakan bahwa kenaikan harga beras tak hanya terjadi di Kabupaten Jember. "Seluruh harga beras premium di Jawa Timur naik," katanya, Selasa (6/2/2024).

Sementara untuk harga beras medium, lanjutnya, memang ada sedikit kenaikan. Namun, jika dibandingkan dengan daerah lain, sesungguhnya harga beras di Jember terendah ketiga se-Jatim untuk saat ini.

Selain itu, dia mengabarkan bahwa kenaikan harga juga terjadi pada bapokting lain. "Bukan menjelang pemilu ya, ini menjelang Imlek dan Ramadan," lanjutnya.

Per kemarin (Senin, 5/2/2024), daging ayam juga naik. Begitu juga dengan harga telur, daging sapi, gula pasir, cabe merah, tomat, dan harga wortel naik antara 1-3 ribu rupiah. "Cabai merah ini seluruh Jatim juga naik," tegasnya.

Dia menyebutkan bahwa salah satu faktornya adalah lantaran bukan masa tanam. Menurut dia, kemunduran masa tanam juga terjadi pada tanaman padi, disebabkan karena terjadinya El-Nino. "Seharusnya, mulai Oktober mulai tanam. Tapi mereka harus mundur," terangnya.

Menyikapi hal itu, Pemkab Jember melalui Disperindag bekerja sama dengan sejumlah stakeholder untuk mengantisipasi hal tersebut. Untuk ketersediaan stok beras, pihaknya sudah berkoordinasi dengan bulog stok mencukupi. Namun, pihaknya tetap harus melakukan antisipasi.

"Mulai 24 Februari mendatang, kami akan menggelar operasi pasar di 20 titik dan pasar murah," ungkapnya.

Terkait kenaikan harga beras, salah satu warga pedagang Pasar Baru K e n c o n g , U n t u n g A s ' a d , membenarkan jika beras perkilo dijual dengan harga Rp 16 ribu. "Naik mas, harga naik trus, dan banyak pembeli yang kadang berkeluh kesah, tapi kami tidak bisa apa apa," jelasnya.

Sementara itu, harga beras di Pasar Kebonagung, Kota Pasuruan, Jawa Timur juga mengalami kenaikan sejak sepekan yang lalu. Akibatnya, pedagang hingga pembeli banyak yang mengeluh.

Wiwik, pedagang sembako di pasar tersebut, mengatakan harga beras medium sudah mengalami kenaikan sejak seminggu yang lalu. Harga kini berkisar Rp15.500 - Rp16.000 ribu per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp13.000 ribu. "Sejak seminggu yang lalu, naik terus dan naik terus, sekarang bisa Rp15.500 - Rp16.000 ribu," kata Wiwik, Selasa (6/2/2024).

Ia juga mengatakan, dengan naiknya harga secara terus-menerus itu membuatnya enggan membeli beras ke tengkulak. "Mau kulak lagi jujur saya takut, lah ini naik terus gimana," terangnya.

Keluhan naiknya harga beras

tersebut juga sampaikan Rina, pembeli beras di toko tersebut. Menurutnya, kenaikan beras faizah, Naiknya harga beras itu menyulitkannya untuk memenuhi kebutuhan dapur. "Segera turun lah, jangan naik terus. Pas kapan hari kan turun, sekarang kok naik lagi," keluhnya.

Sementara itu, Riski Pramita, Kabid Perdagangan Disperindag Kota Pasuruan mengatakan, pihaknya akan segera melakukan operasi pasar untuk kembali menstabilkan harga beras. "Kami rencananya operasi pasar, 10 ton beras," tuturnya.

Sedangkan, di Lamongan harga sejumlah kebutuhan pokok awal bulan Februari mengalami kenaikan. Terpantau, beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut diantaranya adalah beras dan cabe rawit.

Data dari berbagai pasar di Lamongan menunjukkan, beras kualitas medium a mengalami kenaikan harga. Pekan lalu, beras kualitas medium seharga Rp 13 ribu, kini naik menjadi Rp 13.500 atau naik Rp 500 per kilogram.

Sedang beras kualitas premium masih sama dengan pekan lalu, yaitu Rp 15 ribu per kilogram, beras kualitas medium dari Bulog juga masih sama1, yaitu Rp 10.900 per kilogram.

"Awal pekan ini memang ada sejumlah kebutuhan pokok yang harganya naik, seperti beras kualitas medium. Untuk beras kualitas premium dan beras kualitas medium dari Bulog masih sama," kata Kadisperindag Lamongan Anang T a u f i k k e p a d a S U R Y A , Jumat(2/2/2024).

Anang menambahkan, komoditas lain yang juga mengalami kenaikan harga adalah cabe rawit, naik Rp 2 ribu per kilogram, dari semula hanya Rp 36 ribu menjadi Rp 38 ribu.

Harga cabai merah besar juga tergolong masih tinggi, yaitu Rp 75 ribu per kilogram. "Sedang harga daging ayam masih sama seperti minggu lalu, yaitu Rp 36 ribu dan telur ayam juga masih sama, yaitu Rp 27 ribu per kilogram," katanya.

Diungkapkan, penyebab harga beras naik karena ada beberapa kawasan yang masa panennya mundur karena akibat cuaca.

Dan diperkirakan, bulan depan harga beras akan kembali normal, seiring dengan masa panen. Ia berharap saar Ramadan nanti harga beras tidak naik. "Ada beberapa daerah yang biasanya panen sekarang ini masa panennya mundur karena pengaruh cuaca," katanya.

Untuk menstabilkan harga, Disperindag Lamongan akan bergerak bekerjasama dengan semua pihak yang terkait dilanjutkan dengan operasi pasar beras murah di berbagai titik di Lamongan. Pihaknya juga akan terus berupaya memastikan distribusi beras lancar tidak ada kendala di pasaran.

Harganya kembali normal, dan salah satunya caranya adalah terus memasifkan operasi pasar murah. Menjelang bulan puasa dan hari raya, satu bulan setengah kedepan, pihaknya sudah melakukan upaya antisipasi kenaikan harga dengan melakukan pemantauan harga komoditas di pasaran. (lut/dya)

Tegaskan Alun-Alun Merdeka Area Bebas PKL, Pj Wali Kota Malang Ungkap Rencana Penataan

MALANG - Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, tegaskan Alun-alun Merdeka merupakan salah satu kawasan bebas Pedagang Kaki Lima (PKL). pihaknya pun mengungkapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk melakukan penataan.

Pj Wahyu menegaskan, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, kawasan Alun-alun Merdeka merupakan salah satu kawasan bebas PKL. Sehingga berdasarkan Perda ini, Wahyu mengatakan bahwa tidak diperbolehkan aktivitas PKL baik di dalam atau di luar area tersebut. Namun, demi mengakomodir aspirasi masyarakat, Wahyu mengaku pihaknya telah merancang solusi terkait penataan PKL di Alun-alun Merdeka.

"Kita punya Perdana bahwa berjualan di Alun-alun itu memang dilarang. Makanya Satpol selaku penegak Perda, itu terus menjaga kondisi di alun-alun sana. Tetapi kita juga mencari solusi terkait PKL tersebut. Jadi tidak hanya kita meniadakan PKL yang ada di sana, tapi nanti kita akan upayakan pemberdayaan," ujar Wahyu, saat



Ilustrasi PKL yang menjamur di area Alun-alun Merdeka Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

dikonfirmasi awak media, Selasa (6/2/2024).

Diketahui sebelumnya keluhan datang dari beberapa perwakilan PKL Alun-alun Merdeka. Mereka mempertanyakan kejelasan tempat untuk berjualan yang layak dan baik, di salah satu destinasi wisata.

Lebih lanjut, Pj Wahyu juga mengungkapkan adanya momen pemberian Corporate Social

Responsibility (CSR) dari Bank Jatim dalam proses revitalisasi Alun-Alun Merdeka saat ini. Menurutnya, kesempatan ini menjadi salah satu langkah positif yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan penataan PKL di area tersebut.

"Nah salah satunya kita akan memikirkan konsep penataan PKL nanti bagaimana, walaupun tidak harus di alun-alun, tetapi ada alternatif lain untuk

mengalokasikan PKL," tambahnya.

Wahyu menjelaskan, saat ini konsep penataan PKL tengah dalam tahap kajian, dan perhatian khusus diberikan terhadap alternatif lokasi pengalokasian PKL. Meskipun Alun-Alun Merdeka tidak bisa lagi menjadi tempat berjualan PKL sesuai dengan Perda yang ada, rencana meredesain sedang dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Terkait sentra PKL, itu juga masih dalam kajian, karena yang jelas Perdana menyebut kalau di alun alun itu gak boleh ada PKL. Lha untuk segera menyelesaikan itu, kita sekarang kan sedang meredesain. Apabila tidak bisa tercover di alun alun Merdeka, maka kita akan mencari alternatif lain untuk mengalokasikan PKL ini," paparnya.

Diakhir, Wahyu menegaskan, proses revitalisasi saat ini sedang berlangsung. Menurutnya, jika Alun-Alun Merdeka tidak memungkinkan untuk menampung PKL, maka alternatif lokasi akan dicari. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan terhadap permasalahan tersebut. (Santi/Dya)

Pemkab Malang Siapkan Putaran Kedua Sub PIN Polio, Sasar 300 Ribu Anak



Pelaksanaan Sub PIN Polio di salah satu sekolah dasar Kabupaten Malang. (Dok. Puskesmas Pakis)

MALANG - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo menyatakan, pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio putaran pertama telah berhasil mencapai 105 persen. Hal ini mendorong kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk menyelenggarakan putaran kedua pada 19-25 Februari 2024 mendatang. Dengan jumlah sasaran sekitar 310.817 anak usia 0-7 tahun.

Wiyanto menjelaskan, dalam

setiap putaran Sub PIN Polio di Kabupaten Malang, anak-anak usia 0-7 tahun menjadi fokus utama, dengan menerima dua tetes vaksin dalam setiap sesi. Hal ini dikarenakan anak di bawah usia 8 tahun menurutnya lebih rentan terinfeksi virus polio. Wiyanto menyebutkan Sub PIN polio putaran pertama telah mencapai 310.817 anak, melebihi target sasaran yang telah ditetapkan yakni sebanyak 295.751 anak.

"Jadi ya nanti sama dengan yang putaran pertama. Jadi anak-anak usia 0-7 tahun itu dapat dua tetes di putaran pertama kemudian dua tetes di putaran kedua. Jadi kalau sasaran sebenarnya kan ada 295.751 anak. Tapi berdasarkan pelaksanaan pada putaran pertama, itu sudah ada 310.817 anak yang melaksanakan Sub PIN Polio. Jadi nanti kita sasar kembali jumlah tersebut," ujar Wiyanto, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (6/2/2024).

Wiyanto menuturkan, jumlah capaian tersebut mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap program imunisasi ini. Lebih rinci, pada rentang usia 0-59 bulan, menurutnya terdapat partisipasi sebanyak 158.937 anak dari target 185.171, mencapai tingkat kepatuhan sebesar 85,8 persen. Untuk usia 5 tahun sampai kurang dari 7 tahun, sambungnya, capaian mencapai 82.838 anak dari target 74.002.

Sementara pada anak usia 7 tahun, Wiyanto mencatat sekitar 69.042 anak dari target 36.807. Ditegaskannya, keberhasilan ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi untuk melindungi anak-anak dari risiko penyebaran polio di Kabupaten Malang.

"Sampai sekarang belum ditemukan kasus polio di Kabupaten Malang. Mudah-mudahan ya nihil ya. Nah polio ini kan bisa menular, makanya ini digencarkan Sub PIN polio itu," serunya.

Lebih lanjut, Wiyanto menjelaskan bahwa mulanya, kasus polio di Jawa Timur dan Jawa Tengah terdeteksi terutama di Madura dan Klaten, di mana hal ini menciptakan keadaan

darurat kesehatan. Akibat temuan ini, status Kejadian Luar Biasa (KLB) diberlakukan di seluruh daerah di kedua provinsi tersebut. Sehingga dalam merespons terhadap ancaman penyebaran polio ini, menurutnya diselenggarakanlah Sub PIN polio secara serentak di 2 wilayah tersebut.

Tak hanya itu, Wiyanto juga menekankan pentingnya deteksi dini dan tindakan preventif, mengingat polio merupakan virus yang dapat menyebar melalui lingkungan yang kurang bersih dan pada individu dengan daya tahan tubuh yang rendah. Oleh karena itu menurutnya, gencarnya kampanye imunisasi menjadi langkah krusial dalam memperkuat ketahanan tubuh anak-anak dan mencegah potensi penyebaran virus polio di Kabupaten Malang dan sekitarnya.

"Ya itu kan virus. Penyebarannya ya karena lingkungan yang kurang bersih, kepmudian daya tahan tubuhnya kurang. Tapi sebenarnya tergantung pada daya tahan tubuh. Makanya ini kita gencarkan imunisasi dengan baik untuk menguatkan daya tahan tubuh. Karena begitu daya tahan tubuh lemah, ya bisa menyerang," pungkasnya. (Santi/Dya)

ZITA ANJANI

Ajak Anak Muda Jakarta ke Museum

MEMFASILITASI anak muda dalam kegiatan yang mengembangkan minat seni, budaya, dan sejarah adalah salah satu langkah penting dalam menumbuhkan kreativitas dan produktivitas mereka.

Sebagai wakil rakyat yang peduli dengan perkembangan anak muda, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani mengajak anak muda untuk menyempatkan diri berkunjung ke museum.

"Museum di Jakarta itu bagus-bagus lho. Semuanya terawat. Layak dikunjungi. Pemandu juga selalu siap sedia. Harga tiket masuknya terjangkau banget, lagi. Nggak ada yang kurang deh pokoknya," ucapnya di Jakarta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD dan Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Jakarta terus mendorong minat anak muda Jakarta untuk mengunjungi museum. Pada bulan Oktober, tepatnya Jumat (13/10/2023), Komisi E DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk modernisasi Museum Wayang pada 2024.

Selain itu, terdapat Galeri Melaka, hasil kolaborasi antara Disbudpar Jakarta dengan Kerajaan Negeri Melaka di Malaysia, yang baru saja diresmikan pada bulan Desember 2023 di Museum Sejarah Jakarta.

Zita menganggap langkah tersebut sebagai upaya positif untuk menarik minat anak muda Jakarta agar mau datang ke museum.

"Bakal lebih banyak lagi program

yang bisa menjadikan kunjungan ke museum lebih menarik lagi. Kami juga dari DPRD akan terus memantau dan mengevaluasi implementasinya. Nah, bagi anak muda, yuk rame-rame, bikin konten TikTok juga boleh, asal tetap taat peraturan. Bikin kunjungan ke museum jadi viral!," ujarnya.

Profil

Zita Anjani kelahiran Jakarta 12 Maret 1990) biasa dipanggil Zita. Ia merupakan lulusan jurusan Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Kemudian, Zita mengambil program Diploma Montessori Education di Sunshine Teachers Training yang dilanjutkan dengan gelar Master of Science di University College London (UCL), Inggris.

Zita sempat bekerja di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Jenewa, Swiss. Namun, karier di badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sebenarnya mentereng itu dia tinggalkan demi mengejar passionnya di dunia pendidikan.

Zita aktif di DPP PAN Bidang Perempuan Amanat Nasional dan DPW PAN DKI Jakarta. Zita juga mencetak sejarah sebagai perempuan pertama dan termuda menjadi pimpinan DPRD DKI periode 2019-2024.

Nama Zita Anjani mulai diperbincangkan publik, usai postingan video di TikTok terkait isu tunangan Verrel Bramansta dan Putri Zulkifli Hasan

Zita Anjani ini merupakan adik dari Putri Zulkifli Hasan dan putri dari pasangan Zulkifli Hasan-Soraya Zulkifli Hasan.



Sumber : zitaanjani/Instagram

"Bakal lebih banyak lagi program yang bisa menjadikan kunjungan ke museum lebih menarik lagi. Kami juga dari DPRD akan terus memantau dan mengevaluasi implementasinya. Nah, bagi anak muda, yuk rame-rame, bikin konten TikTok juga boleh, asal tetap taat peraturan. Bikin kunjungan ke museum jadi viral!,"



TERAPI RADIASI DIBUTUHKAN 50-60 PERSEN PASIEN KANKER

DOKTER spesialis onkologi radiasi RS Cipto Mangunkusumo dr. Angela Giselvania, Sp.Onk.Rad(K) mengatakan sekitar 50-60 persen pasien kanker memerlukan terapi pengobatan dengan radiasi untuk mendukung pengobatan kanker selain bedah dan kemoterapi selama proses penyembuhannya.

“Peran radiasi itu sifatnya saling membantu bersama dengan bedah dan kemoterapi, tergantung dari jenis sel kankernya dan stadiumnya, tapi sekitar 50-60 persen pasien yang kanker pasti membutuhkan radiasi dalam pengobatannya,” kata Angela dalam diskusi kesehatan yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Dokter yang menamatkan studi di Universitas Indonesia ini mengatakan terapi radiasi atau disebut radioterapi, berguna untuk membunuh benih-benih kanker yang sekiranya masih tersisa setelah pembedahan dan kemoterapi dilakukan pasien kanker agar pasien bersih dari kanker.

Untuk beberapa penyakit kanker seperti kanker leher rahim stadium 2B, kanker otot, atau kanker otak, terapi radiasi bisa dilakukan tanpa operasi pembedahan terlebih dahulu.

Terapi radiasi juga dilakukan untuk mengurangi perdarahan pada jenis kanker tertentu dan mengurangi rasa nyeri hebat yang kerap dialami pasien kanker.

Terapi radiasi juga menjadi salah satu alternatif jika pasien kanker memang tidak memungkinkan untuk menjalani operasi pengangkatan kankernya.

“Justru biasanya pasien-pasien yang tidak memungkinkan untuk dibedah atau kondisinya tidak cukup fit untuk dibedah, radiasi salah satu alternatifnya, jadi kalau diradiasi itu

pasien tidak akan merasakan sesuatu atau melihat sesuatu, radiasi kan tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau, jadi seperti kalau kita CT Scan,” kata Angela.

Angela mengatakan terapi radiasi juga terbilang aman, karena teknologi dan mesin yang sudah jauh lebih canggih, alat hanya akan meradiasi sel kanker yang perlu dihilangkan sehingga jaringan lain di sekitar kanker akan aman.

Namun, setiap proses pengobatan tidak menampik akan ada efek sampingnya pada tubuh. Pada terapi radiasi, Angela mengatakan ada beberapa efek samping saat menjalani proses radiasi seperti diare jika di-radiasi sekitar perut dan kulit yang akan cenderung berubah warna, namun tidak sampai gosong atau terbakar dan akan pulih setelah terapi selesai.

Ia juga berharap semakin banyak rumah sakit yang menyediakan terapi radiasi, karena saat ini rumah sakit yang menyediakan terapi radiasi masih belum sebanding dengan jumlah pasien kanker di Indonesia yang cukup tinggi.

Seringkali pasien harus mendaftar beberapa bulan sebelum nya untuk mendapatkan jadwal terapi radiasi karena alat yang masih terbatas.

Angela mengingatkan untuk lebih memperhatikan kesehatan agar mencegah kanker dengan menjalani pola hidup sehat.

Bila terdapat benjolan atau perubahan di jaringan kulit segera berobat ke dokter untuk penanganan yang lebih dini.

Kemenkes

Menurut informasi yang disiarkan di laman resmi Kementerian Kesehatan, penyakit kanker setiap tahun menyebabkan 9,6 juta kematian di dunia serta merupakan masalah kesehatan global dan nasional.

Data Globocan tahun 2020 menunjukkan kasus baru kanker di Indonesia mencapai 396.914 kasus dan 234.511 di antaranya mengakibatkan kematian.

Pada perempuan penyakit kanker yang paling banyak ditemukan yakni kanker payudara (65.858 kasus)

diikuti kanker leher rahim (36.633 kasus) sedangkan pada lelaki paling banyak kanker paru-paru (34.783 kasus) diikuti kanker kolorektal (34.189 kasus).

Menurut Kementerian Kesehatan, 30 sampai 50 persen kanker dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko dan menjalankan perilaku CERDIK.

Praktisi kesehatan masyarakat Ngabila Salama mengingatkan pentingnya CERDIK, yaitu: Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dengan kalori seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola stres, untuk mencegah kanker (Antara)



LENZING LUNCURKAN MATERIAL SEPATU TANPA BAU

PRODUSEN penghasil serat berbasis kayu, Lenzing Group bersama dua mitranya yakni Recyc Leather dan GANNI telah meluncurkan material sepatu baru yang bersifat tidak berbau dan tidak disukai bakteri.

“Kemitraan kami dengan Lenzing dan GANNI menunjukkan potensi Pélinova® sebagai alternatif yang memiliki nilai berkelanjutan sesungguhnya dibandingkan kulit tradisional, hal ini pun menginspirasi kami untuk terus memperluas penerapan Pélinova® dalam membentuk masa depan industri kulit,” kata salah satu pendiri Recyc Leather Olivier Grammont dalam keterangan resminya di Jakarta.

Grammont menuturkan material tersebut diberi nama Pélinova®, sebuah material inovatif yang mengawinkan serat TENCEL™ Lyocell dengan serat kulit daur ulang untuk diaplikasikan pada high-end fashion.

Pélinova® diciptakan melalui proses yang unik dan transparan di mana menyertakan koleksi kulit daur ulang pre-konsumen dan TENCEL™ Lyocell fibers, sebuah material yang memukau dalam portfolio TENCEL™ brand yang diproduksi dari sumber daya yang terlindungi dan proses produksi closed-loop1.

Nantinya, penggunaan material kulit terbaru itu akan digunakan pada koleksi merek kontemporer Denmark, GANNI yakni GANNI’s Slouchy Boots yang akan diluncurkan pada awal tahun ini.

“Usaha kolaborasi antara Lenzing dan Recyc Leather menghasilkan material yang lembut, fleksibel dan tahan lama, dengan dampak lingkungan yang hanya menggunakan 70 persen air lebih sedikit ketimbang metode tradisional dan CO2 emisi yang telah berkurang,” ucapnya.

Chief Sustainability Officer GANNI Lauren Bartley menambahkan, kolaborasi dan eksperimen yang terjalin sangat penting untuk mengembangkan inovasi kain baru guna mencapai tujuan pengurangan karbon secara ambisius.

Ia menilai material baru tidak hanya dapat digunakan pada alas kaki, sebab pengaplikasian Pélinova® Recyc Leather dengan serat TENCEL™ Lyocell juga tampak pada kategori aksesoris.

Oleh sebab itu, ketiga pihak sedang melakukan pengembangan di masa depan agar semakin mampu meningkatkan penggunaan material tersebut.

“GANNI telah bermitra dengan Lenzing selama bertahun-tahun, menggunakan berbagai bahan dasar serat Lenzing dalam fabrikasi GANNI, dan Lenzing terus menjadi mitra yang tepat dalam hal menemukan material pilihan yang terbukti memiliki dampak lingkungan lebih rendah,” katanya.

Vice President Global Textiles Business Lenzing AG Florian Heubrandner memberikan apresiasinya dengan mengatakan bahwa kerja sama itu dapat membuka kekuatan inovasi kain yang sadar akan lingkungan.

Heubrandner menjelaskan dengan memanfaatkan terobosan menarik dalam bidang alas kaki itu, Recyc Leather punya peluang dalam memperluas penerapan kain pada produk kulit lainnya yang mencakup tekstil rumah, furnitur, interior mobil, dan high-end segmen.

“Dengan penggunaan serat TENCEL™ Lyocell yang diproduksi secara bertanggung jawab pada Pélinova®, kami tidak hanya menghadirkan alternatif unik untuk aplikasi kulit pada alas kaki yang

memberikan kenyamanan jangka panjang, namun juga menunjukkan keserbagunaan aplikasi serat,” katanya.

Lenzing Group, produsen serat khusus berbasis kayu terkemuka di dunia, telah mengumumkan rencana peningkatan produksi mereka untuk serat viscose yang bertanggung jawab dan berkualitas tinggi.

Konversi pabrik Purwakarta yang berdekatan dengan mitra rantai nilainya di Asia Pasifik memungkinkan transportasi serat viscose yang lebih bertanggung jawab, dalam kuantitas yang lebih besar memiliki jarak dan waktu tunggu yang lebih pendek, sehingga mengurangi jejak karbon pada rantai pasok tekstil secara keseluruhan saat memenuhi kebutuhan jenama dan peritel konsumen di Asia.

Diproduksi dengan penggunaan energi fosil dan air yang lebih rendah hingga 50% dibandingkan viscose pada umumnya[2] dan memiliki sertifikasi EU Ecolabel yang diakui secara internasional, serat viscose dengan merek LENZING™ ECOVERO™ telah digunakan dalam woven untuk fesyen dan produk pakaian rajut seperti atasan, dress, kaos, dan loungewear penuh gaya.

Sejalan dengan tujuan Lenzing untuk mengurangi emisi CO2 per ton produk di seluruh grup sebesar 50 persen pada 2030, dan mencapai produksi netral CO2 pada 2050, pabrik yang telah dikonversi ini berhasil mengurangi emisi CO2 hingga sekitar 130.000 ton setiap tahunnya.

Faktor penting yang memungkinkan Lenzing mencapai transformasi perintis ini adalah konversi dari energi berbasis fosil menjadi energi berbasis panas bumi di pabrik tersebut (Antara)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARNO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenalan wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenalan wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenalan atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

CARA GAMPANG KENDALIKAN STRES: TIDUR SIANG!

STRES menjadi hal yang umum dirasakan semua orang ketika tengah mengalami masalah. Baik itu di pekerjaan ataupun pribadi.

Jika tidak dikendalikan, stres bisa berdampak pada depresi hingga risiko bunuh diri. Karena itu, penting mengendalikan stres Anda agar tidak berkepanjangan.

Stres adalah suatu bentuk tekanan fisik dan psikologis yang muncul saat menghadapi kondisi yang terasa berbahaya. Mudah-mudahan, stres adalah cara tubuh memberikan tanggapan atas ancaman, tekanan, dan tuntutan yang muncul.

Penyebabnya bisa sangat beragam, mulai dari diri sendiri hingga faktor lingkungan. Saat merasakan adanya ancaman, sistem saraf akan memberikan respons dengan cara merilis aliran hormon kortisol dan adrenalin.

Kedua jenis hormon ini bisa memicu munculnya reaksi pada tubuh, misalnya jantung yang berdetak lebih cepat, otot tubuh terasa menegang, napas memburu, dan tekanan darah yang mengalami peningkatan.

Berbagai reaksi yang terjadi ini memiliki istilah respons stres atau "fight-or-flight". Masalah ini bisa terjadi pada setiap orang, mulai dari anak hingga dewasa. Ketika terjadi tubuh akan menunjukkan sinyal waspada terhadap bahaya dan tantangan tersebut.

Dilansir dari timesofindia, ini 6 cara mudah namun efektif mengendalikan stres

1. Akui stres Anda

Mulailah dengan meluangkan waktu sejenak untuk mengakui dan menerima stres Anda. Daripada menganggapnya sebagai hambatan, pandanglah hal itu sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi.

Tindakan mengakui stres bukanlah tanda kelemahan namun merupakan langkah pertama menuju mencari bantuan atau menemukan solusi konstruktif.

Menghadapi stres secara

langsung dapat menjadi kata-lisator yang kuat untuk perubahan positif dan pengembangan pribadi.

2. Kunyah permen karet

Untuk teknik pengurangan stres yang tidak terduga, ambillah permen karet, terutama yang memiliki aroma yang menyenangkan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan secara online di US National Library of Medicine menunjukkan bahwa mengunyah permen karet selama tiga menit saja dapat menurunkan tingkat stres secara signifikan.

Tindakan mengunyah yang berirama melibatkan pikiran dan indera Anda, menawarkan cara yang cepat dan mudah untuk mengurangi stres. Jadi, lain kali jika stres menyerang Anda, masukkan permen karet dan biarkan keajaibannya bekerja.

3. Tutup mata Anda dan pindai tubuh Anda

Ciptakan ruang yang menenangkan, pejamkan mata, dan mulai pemindaian tubuh secara sadar dari ujung kepala hingga ujung kaki.

Perhatikan sensasi atau ketegangan fisik apa pun. Latihan kesadaran yang sederhana namun kuat ini meningkatkan kesadaran tubuh, membantu Anda melepaskan akumulasi stres.

Luangkan waktu sejenak untuk terhubung kembali dengan diri Anda sendiri, menghargai masa kini dan melepaskan beban yang membebani Anda.

4. Hilangkan stresnya

Manfaatkan ke-

kuatan terapeutik menulis untuk mengurangi stres. Terlibat dalam "jadi apa?" berolahraga dengan berulang kali bertanya pada diri sendiri, "Terus kenapa?" sampai terungkap wawasan yang lebih dalam tentang situasi tersebut.

Menuliskan pemikiran Anda tidak hanya memberikan pelepasan emosional tetapi juga menawarkan kejelasan, membantu Anda mendapatkan perspektif dan mengelola situasi stres dengan pikiran yang lebih jernih.

5. Tidur siang

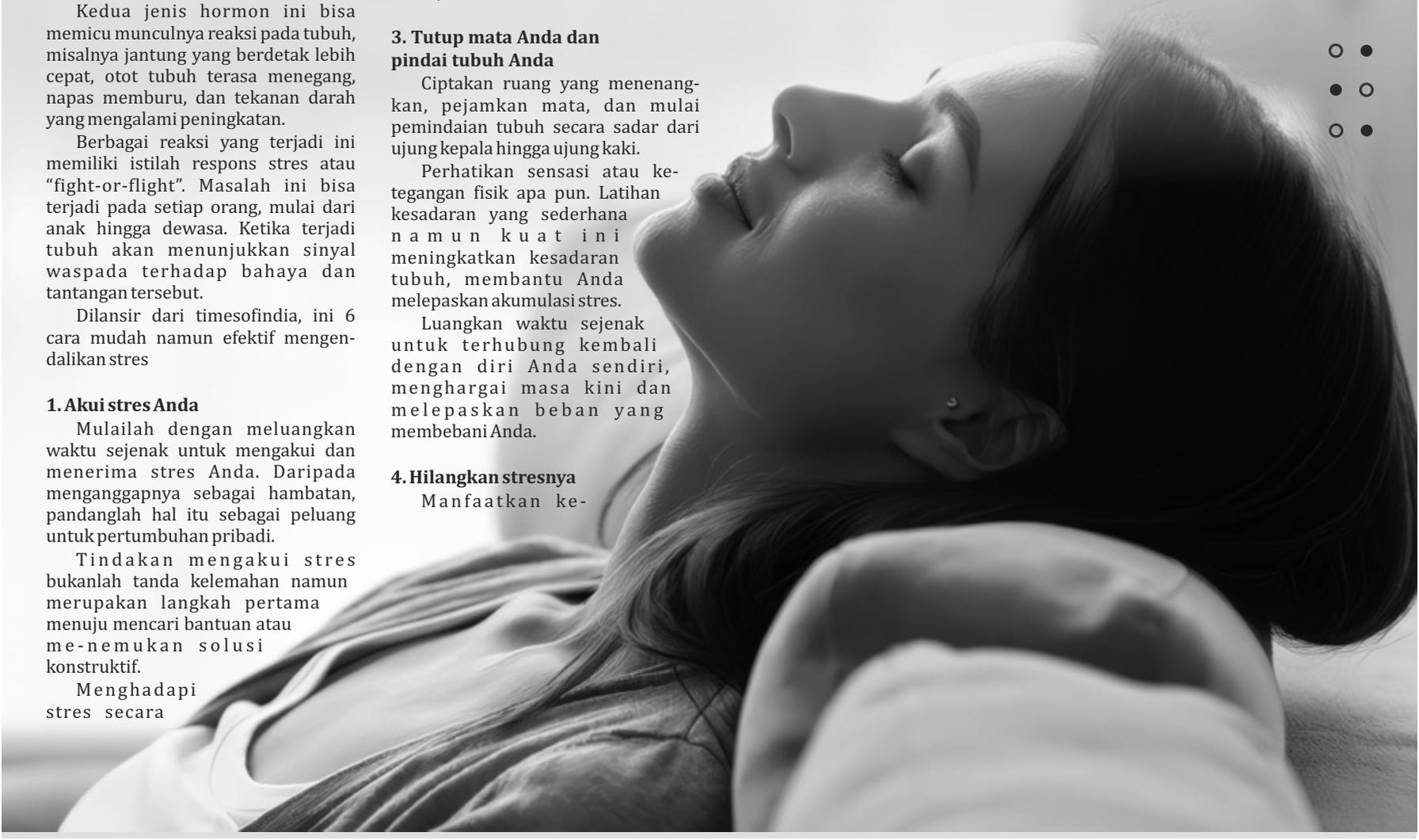
Di hari yang sibuk, tidur siang singkat selama 10 menit bisa menjadi solusi untuk mengatur ulang pikiran Anda. Kurang tidur dapat memperparah stres, sehingga tidur siang singkat menjadi solusi yang menyegarkan.

Temukan tempat yang tenang, pejamkan mata, dan biarkan diri Anda melarikan diri sejenak untuk mengisi ulang baterai mental Anda. Anda akan terkejut betapa jeda singkat dapat meningkatkan ketahanan Anda terhadap tantangan hari ini.

6. Latih pernapasan dalam

Tambahkan teknik pernapasan 4-7-8 ke dalam rutinitas Anda untuk mengaktifkan respons relaksasi. Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, dan buang napas selama 8 detik.

Bernapas dalam-dalam tidak hanya menenangkan sistem saraf tetapi juga memberikan rasa ketenangan secara langsung. Jadikan teknik sederhana namun efektif ini sebagai bagian rutin dari hari Anda untuk meningkatkan manajemen stres dan kesejahteraan mental (Bisnis)



Pemilu Mendekat ... (dari Hal 1)

KETUA Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan ada 5 provinsi dengan jumlah pelanggaran terbanyak.

Agus mengatakan lima provinsi itu adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

"Itu 5 besar, mudah-mudahan berhenti sampai di sini karena masih ada sekian hari sampai Pemilu dan Pilkada di 27 November," kata Agus dalam paparannya di rapat koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Selasa, (6/2/2024).

Menurut data yang dipaparkan Agus, jumlah pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Sulawesi Selatan berjumlah 45 pelanggaran. Sedangkan di Sulawesi Tenggara terjadi 29 pelanggaran; Jawa Tengah 22 pelanggaran; Sulawesi Barat 20 pelanggaran; dan Sulawesi Tengah 8 pelanggaran.

Adapun di posisi 6 ditempati Provinsi Riau dengan 7 pelanggaran; Provinsi Banten 6 pelanggaran; Nusa Tenggara Barat 5 pelanggaran; Nusa Tenggara Timur 4 pelanggaran; Sulawesi Utara 3 pelanggaran; dan Jambi 3 pelanggaran. Pelanggaran juga ditemukan di sejumlah provinsi lain dengan jumlah antara 2 sampai 1 pelanggaran.

Agus mengatakan KASN telah memetakan daerah-daerah yang rawan pelanggaran netralitas ASN. Dia mengatakan ada daerah yang tergolong merah, kuning dan hijau. "Ini bukti ada daerah-daerah yang perlu benar-benar diawasi agar tidak meningkat," kata dia.

Selain itu, Agus mengatakan sejauh ini ada 13 ASN yang dijatuhi sanksi berat berupa pemecatan dengan tidak hormat. Lima ASN yang dipecat itu memiliki jabatan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); 3 pelaksana; 2 administrator; 2 lurah/camat; dan 1 fungsional. "Ini bukan main-main, ini serius," kata dia.

Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah menjadi anggota atau pengurus partai politik. Sementara itu, modus-modus pelanggaran ASN lainnya yang ditemukan adalah mengarahkan untuk memilih calon tertentu, hingga mengarahkan pembangunan fisik daerah yang tidak berdasarkan prioritas melainkan kepentingan elektoral.

Agus mengatakan KASN memprediksi pelanggaran netralitas ASN pada 2024 akan mencapai 10 ribu pelanggaran atau naik 5 kali lipat dibandingkan Pemilu 2020. Prediksi itu bertumpu pada pelanggaran ASN yang terjadi pada 2020 yang sebanyak 2.304 kasus, padahal Pemilu hanya dilakukan di 270 daerah. Dengan Pemilu yang diadakan di 548 daerah, KASN memprediksi pelanggaran netralitas ASN akan ikut membengkak.

Senada, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto menilai pelanggaran

netralitas ASN pada Pemilu 2024 semakin marak. Dia menduga hal itu terjadi secara sistemik dan direncanakan.

"Kami berpikir memang seperti ada skenario besar yang telah dipersiapkan," kata Tasdik dalam Webinar yang bertajuk 'Pemilu Semakin Dekat, Pelanggaran Netralitas ASN Semakin Nekat' pada Selasa (6/2/2024).

Bukan tanpa sebab dia menyatakan dugaan tersebut. Tasdik menyampaikan ada beberapa indikator yaitu adanya pemaksaan dan likuidasi pengawasan netralitas ASN.

Tasdik menyebut likuidasi atau pengawasan yang cair itu dilakukan meski lewat UU Nomor 20 Tahun 2023. Oleh sebab itu, dia berkesimpulan Pemilu saat ini buruk.

"Inilah ironi netralitas dan gejala runtuhnya demokrasi yang sedang sama-sama kita hadapi," ujarnya.

Menurut Tasdik, pelanggaran netralitas ASN yang paling berpotensi merusak demokrasi yaitu dengan merekayasa regulasi, memobilisasi SDM, alokasi anggaran hingga bantuan program.

"Lalu [diberi] fasilitasi sarana atau pra sarana dan bentuk dukungan lainnya untuk memberikan keberpihakan kepada salah satu paslon," kata dia.

"Maka yang terjadi bukan hanya politisasi birokrasi, tapi semakin keras mendorong birokrasi berpolitik. Moralnya adalah tergerusnya etika ASN dengan kondisi politik yang semakin ugal-ugalan," imbuhnya.

Dia berpendapat pesta demokrasi seharusnya berlangsung secara jujur adil dan demokratis. Namun, ternyata realitasnya jauh dari harapan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

"Terutama terkait dengan kondisi netralitas ASN dan bahkan aparaturnegara lainnya. Pemilu semakin dekat ternyata pelanggaran netralitas ASN, semakin nekat," ujarnya.

Disanksi Potong Gaji

Sementara, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mencatat 47 pelanggaran netralitas berupa disiplin dan kode etik ASN yang dilaporkan hingga 31 Januari 2024. Pelanggaran netralitas ini terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 dimulai pada tahun 2023.

"Yang dilaporkan hingga 31 Januari 2024, yakni sebanyak 47 laporan pelanggaran, terdiri dari 42 laporan pelanggaran disiplin dan 5 (lima) laporan pelanggaran kode etik. Data ini masih berpotensi akan terus bergerak selama proses Pemilu dan Pemilihan tahun ini berlangsung," kata Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Nanang Subandi, dikutip Selasa (5/2/2024).

Nanang menyampaikan bahwa jenis pelanggaran netralitas berupa disiplin yang dilaporkan meliputi aksi pemberian dukungan kepada pasangan calon (Paslon) tertentu, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, mengadakan kegiatan

yang mengarah pada keberpihakan, sampai dengan ikut sebagai peserta kampanye paslon.

Sementara jenis pelanggaran netralitas berupa kode etik seperti membuat postingan dukungan kepada paslon, likes/comment/share paslon tertentu, memasang spanduk, sampai dengan menghadiri deklarasi paslon tertentu.

Nanang menegaskan sanksi netralitas berupa pelanggaran disiplin tersebut berkonsekuensi terhadap hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25% selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan; dan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Sanksi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Sementara sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Dugaan adanya pelanggaran netralitas ASN sendiri berasal dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui kanal informasi dan pengaduan Pemerintah, seperti media sosial dan LAPOR.

"Setiap laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh Kementerian/Lembaga yang masuk dalam satuan tugas atau Satgas Netralitas ASN, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN); Kementerian PANRB; Kementerian Dalam Negeri; Bawaslu; dan KASN," terangnya.

Adapun, lanjut Nanang, laporan dugaan pelanggaran yang masuk diproses oleh Satgas Netralitas melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), mulai dari proses pengecekan, verifikasi - validasi, rekomendasi penjatuhan disiplin, sampai dengan pemantauan penegakan disiplin oleh PPK instansi.

TPN Temukan 400 Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md menemukan 400 dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan dugaan pelanggaran pemilu itu bersifat masif dan cukup meluas.

"Nah kalau pelanggaran itu dari data kita. Kita mengumpulkan sekira 400 pelanggaran. Tapi itu dari beberapa sumber. Siber society, dari media, dari Bawaslu dan dari hotline yang kita punya sendiri," kata Todung kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (6/2/2024).

Todung mengatakan tidak semua

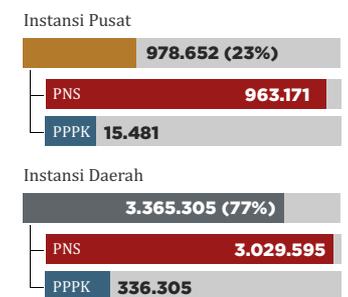
laporan dugaan pelanggaran yang diterima tersebut diproses. Sementara sebagian lagi yang diterima dapat diproses.

"Nah, apakah itu semua akan diproses? Tentu laporan yang masuk pada kita sebagian kita proses ada yang tidak. Tapi yang 40 ribu, itu bukan datang dari kami, 40 ribu itu datang dari satu organisasi jagapemilu. Nah mereka itu yang punya aplikasi, di mana kita bisa melihat jumlah pelanggaran itu," jelasnya.

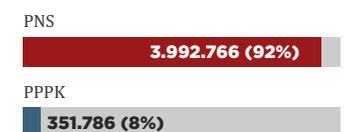
Menurutnya, dari dugaan laporan pelanggaran itu, tidak ada satupun aplikasi maupun organisasi yang bisa mendokumentasikan dan mencatat semuanya. Oleh sebab itu, Todung menyebut pelanggaran itu bersifat masif dan cukup meluas.

"Nah tapi saudara-saudara, saya harus mengatakan bahwa tidak ada satupun aplikasi atau prganisasi yang bisa mendokumentasikan atau mencatat semua pelanggaran yang ada. Oleh karena itu saya mengatakan pelanggaran itu sifatnya masif, cukup meluas, dan itu sulit untuk diketahui jumlah persisnya seperti apa. Itu angka-angka yang gelap sebenarnya, tapi indikasinya benar," tuturnya. (wid,rls,ist/Dya)

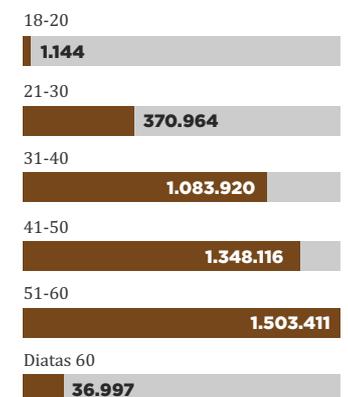
STATISTIK ASN RI PER 2022



Total Jumlah ASN Indonesia



Jumlah ASN Indonesia Berdasarkan Usia



Bansos Beras Disetop Sementara Gegara Masa Tenang Pemilu

JAKARTA-Pemerintah menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras sepanjang 8 sampai dengan 14 Februari mendatang. Saat ini bansos diketahui menjadi sorotan karena ada dugaan pembagiannya dipolitisasi untuk pasangan calon tertentu.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bantuan pangan disetop karena menghormati Pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

"Kami hormati event Pemilu 2024 ini, sehingga bantuan pangan kami hentikan sementara 8 sampai dengan 14 Februari 2024," ucapnya Selasa (6/2/2024).

Bantuan pangan berupa beras itu sejatinya bakal digelontorkan oleh pemerintah hingga Juni 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memastikan bantuan 10 kg beras itu disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Nantinya, setiap keluarga akan menerima bansos 10 kg beras setiap bulan.

"Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024," tulis Jokowi dalam akun X miliknya, @jokowi, Senin (29/1).

Dalam unggahan tersebut, Jokowi menyerahkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin.

Tak cuma sampai Juni, bahkan Jokowi membuka peluang bansos beras 10 kg ini bisa diperpanjang lagi sesuai anggaran negara.

"Saya harap produktivitas padi pun dapat ditingkatkan sehingga berdampak baik pada harga beras dengan suplai beras yang melimpah," ujarnya.

Menurutnya, bansos beras ini dikurangkan pemerintah akibat naiknya harga beras karena gagal panen hampir di semua negara.

"Perubahan iklim yang mengakibatkan kegagalan panen tersebut menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan dalam negerinya," ungkap Jokowi.

Tuntutan Komnas HAM

Komisi Nasional hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bantuan sosial (Bansos)



(ilustrasi) Warga menerima beras pada pembagian CBP oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. (ANTARA)

yang digelontorkan pemerintah tidak digunakan untuk menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Capres-cawapres) tertentu.

Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian mengatakan, Presiden Jokowi harus berkomitmen atas pelaksanaan pemilu yang jujur, demokratis, adil, dan ramah menghormati hak asasi manusia (HAM).

Pesan ini Saurlin sampaikan dalam konferensi pers Komnas HAM bersama sejumlah lembaga nasional HAM lainnya.

"Presiden perlu memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh aparat penyelenggara negara, termasuk bantuan sosial, untuk pemenangan salah satu peserta pemilu," ujar Saurlin dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Jokowi juga diminta memperkuat komitmen dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM dalam pelaksanaan pembangunan.

Menurut Komnas HAM, kebijakan mengenai proyek strategis nasional (PSN) perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM terhadap berbagai kelompok rentan seperti masyarakat adat serta lingkungan.

"Termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak-hak pekerja, utamanya pekerja di industri pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya," kata Saurlin.

Pihaknya juga meminta pemerintah menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi serta melakukan proses hukum yang transparan dan adil.

Selain itu, Komnas HAM juga

kewenangan, anggaran, maupun sumber daya manusia (SDM) mereka.

Diketahui, Pemerintah memotong anggaran 5% untuk bantuan sosial (bansos). Menanggapi hal ini, Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respons tegas terhadap pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurut Ganjar perlu adanya kontrol parlemen terhadap anggaran kementerian yang berasal dari APBN.

"Ya kalau kemudian ini sebagai sebuah kontrol sistem menurut saya bagus agar tidak ugul-ugalan begitu saja. Dan saya heran apakah memang kemiskinan kita meningkat, kok bantuan sosialnya meningkat gitu," ungkap Ganjar usai kampanye akbar se-Kalimantan Timur di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (6/2/2024).

"Apakah ini sebuah pengakuan yang dilakukan secara tidak langsung dan itu menunjukkan pada publik, ya kemiskinan meningkat banyak orang dibantu maka saya berikan atau karena alasan bencana?," tambah Ganjar.

Ganjar juga mengungkapkan kebutuhan untuk mengontrol penyaluran bansos, khususnya saat pembagiannya semakin masif di awal tahun ini.

Ia menegaskan bahwa pengawasan dapat meminimalisir klaim-klaim yang muncul dari pihak tertentu terkait pemberian bansos.

"Kemarin ada alasannya yang ini dan sebagainya, tapi sudah lah kami semua sudah tahu mau berdebat kayak apapun ada rasa yang bisa disampaikan oleh masyarakat bahwa ini sesuatu yang tidak wajar, oke," jelas Ganjar. (Wid,rls,ist/dya)

BELANJA PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN FUNGSI DAN JENIS DALAM APBN (2014-2024)*

NO	NAMA DATA	FUNGSI PENDIDIKAN	FUNGSI KESEHATAN	JENIS BANTUAN SOSIAL
1	2014	122.700.000.000.000	49.400.000.000.000	97.924.676.539.384
2	2015	146.100.000.000.000	51.400.000.000.000	97.151.198.887.033
3	2016	132.000.000.000.000	59.600.000.000.000	49.613.539.133.477
4	2017	138.500.000.000.000	57.200.000.000.000	55.297.216.841.355
5	2018	145.900.000.000.000	61.900.000.000.000	84.318.412.919.513
6	2019	155.200.000.000.000	71.000.000.000.000	112.480.254.777.629
7	2020	155.100.000.000.000	105.100.000.000.000	202.529.969.428.206
8	2021	162.346.000.000.000	211.328.800.000.000	173.654.105.302.037
9	2022	160.139.700.000.000	124.469.600.000.000	161.523.078.405.990
10	2023	183.080.100.000.000	92.723.500.000.000	146.469.100.000.000
11	2024	225.072.800.000.000	97.429.300.000.000	157.303.000.000.000